

---

**KAJIAN PENGARUH SEBELUM DAN SESUDAH PEMBANGUNAN JEMBATAN SURAMADU TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BANGKALAN****Parikesit Penangsang<sup>1</sup>, Pramita Studiviani<sup>2</sup>, Hertien Yuliaty<sup>3</sup>**Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya<sup>123</sup>[parikesit\\_1@untag-sby.ac.id<sup>1</sup>](mailto:parikesit_1@untag-sby.ac.id)**ABSTRACT**

Suramadu is a bridge that crosses the Madura Strait, with a length of 5,438 m, which connects Bangkalan Regency with the City of Surabaya and is the longest bridge in Indonesia today. Suramadu Bridge is believed to be able to increase the smooth flow of traffic or transportation of goods and people, which can stimulate economic development in Madura, especially in Bangkalan Regency. Economic development can be seen from the increasing economic growth through economic development in the real sector, namely in agriculture, industry, trade, services. Growth in the real sector will contribute to PAD in the form of taxes and levies, the influence of the two posts can be calculated using the Regression Analysis and Difference Test. 1) The results of the regression analysis are that before the suramadu bridge contributed fees to the PAD and the tax did not, but after the bridge the tax contributed to the PAD and the retribution did not. 2) Difference Test Results, before and after the Suramadu bridge, the tax post has a strong relationship and influence on PAD, because activities in the real sector are increasingly developing and increasing the flow of goods into the Regency. Bangkalan. However, the levies have less strong connection and less influence on PAD because the activities in Public Services, Business Services and Licensing are still underdeveloped (eg tourism, etc.). This economic situation needs the role and efforts of local governments to carry out economic development.

**Keywords: Bridge Of Suramadu, Tax, Retribution and Original Income****1. PENDAHULUAN**

Kabupaten Bangkalan berada di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini terletak di ujung paling barat Pulau Madura. Pelabuhan Kamal merupakan pintu gerbang Madura dari Jawa, di mana terdapat layanan kapal feri yang menghubungkan Madura dengan Surabaya (di Pelabuhan Ujung). Jembatan Suramadu (Surabaya - Madura) telah beroperasi dan merupakan jembatan terpanjang di Indonesia.

Jembatan Suramadu melintasi Selat Madura, dengan panjang 5.438 m, dan merupakan jembatan terpanjang di Indonesia. Tahun 2003 dikeluarkan Kepres Nomor 79 tanggal 27 Oktober 2003 tentang pembangunan Jembatan Surabaya – Madura, Pembangunan jembatan ini dilakukan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 20 Agustus 2003, dan dibangun serta diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Juni 2009.

Jembatan Suramadu diyakini dapat meningkatkan kelancaran arus lalu lintas atau angkutan barang dan orang. Dengan semakin lancarnya arus lalu lintas berarti menghemat waktu dan biaya. Manfaat selanjutnya merangsang aktivitas perekonomian. Selain itu akan memacu pertumbuhan ekonomi, khususnya untuk Pulau Madura.

Di Madura, umumnya kegiatan ekonomi masih bertumpu pada sektor pertanian primer (tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan). Artinya pertanian atau sektor tradisional menjadi sektor andalan yang nampak dari perolehan PDRB terbesar dibandingkan sektor lain.

Jembatan Suramadu akan merangsang kegiatan perekonomian, berkembangnya usaha di sektor pertanian, industri, perdagangan, jasa dan meningkatnya arus barang masuk ke Pulau Madura, serta meningkatkan PDRB dan kesejahteraan masyarakat. (Tabel 1)

Tabel 1. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bangkalan atas Dasar Harga Konstan 2000

LAPANGAN USAHA	2012	2013
1. PERTANIAN	32.11	31.63
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	1.57	1.6
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	3.91	3.88
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	0.77	0.77
5. BANGUNAN	7.5	7.49
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	28.35	29.11
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	7.22	7.15

8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	4.58	4.53
9. JASA-JASA	14	13.85
PDRB DENGAN MIGAS	100	100
PDRB TANPA MIGAS	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Bangkalan

Pembangunan jembatan Suramadu untuk mempercepat pembangunan di Pulau Madura, yaitu meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi di Madura yang relatif tertinggal dibandingkan dengan Kawasan lain di Provinsi Jatim. Sejak diresmikan Jembatan Suramadu, kabupaten Bangkalan menjadi gerbang utama Pulau Madura serta menjadi salah satu destinasi wisata pilihan di Jawa Timur, baik dari keindahan alamnya (Bukit Jaddih, Gunung Geger, Pemandian Sumber Bening - Langkap - Modung dsb); budaya (Karapan sapi, dsb), serta wisata kuliner di antaranya adalah nasi bebek khas Madura.

Pemerintah pusat membangun infrastruktur Jembatan Suramadu diharapkan berpotensi bagi pulau Madura, Khususnya di Kabupaten Bangkalan, dapat memberikan kontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat (PAD) Pendapatan Asli Daerah Kab. Bangkalan.

Tabel 2. PDRB Kabupaten Bangkalan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2018

Lapangan Usaha PDRB	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,988,809	3,248,154	3,590,158	4,021,106	4,410,605	4,897,643	5,262,527
B. Pertambangan dan Penggalian	7,629,499	8,482,583	7,611,369	7,847,911	8,793,029	4,924,537	4,313,195
C. Industri Pengolahan	281,830	318,571	348,801	387,863	432,702	474,906	509,193
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5,097	5,366	5,404	5,340	5,991	6,887	7,424
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,521	10,376	11,875	13,163	14,192	15,546	17,892
F. Konstruksi	1,066,914	1,292,369	1,583,564	1,824,771	2,133,480	2,326,673	2,774,550
H. Transportasi dan Pergudangan	1,524,585	1,736,539	1,983,955	2,229,889	2,451,614	2,726,217	3,060,038
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	176,778	184,090	187,711	206,514	228,717	255,779	279,509
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	109,884	123,679	140,655	155,383	177,613	202,838	231,018
J. Informasi dan Komunikasi	528,961	560,967	612,385	691,169	740,788	806,098	893,341
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	188,051	210,743	237,607	269,101	293,434	320,105	353,943
L. Real Estate	126,805	142,769	156,099	170,224	182,506	203,083	222,177
M,N. Jasa Perusahaan	28,393	31,086	34,279	37,858	40,698	45,378	49,843
O. Administrasi Pemerintahan	624,708	729,381	833,045	919,624	976,488	1,075,369	1,175,775
P. Jasa Pendidikan	450,300	486,605	541,916	590,001	644,361	718,561	770,354
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	41,973	45,822	50,368	54,665	60,090	66,511	72,579
R,S,T,U. Jasa Lainnya	99,302	105,329	107,931	113,808	122,339	132,809	141,042
PDRB	15,881,409	17,714,427	18,037,119	19,538,387	21,708,648	19,198,940	20,134,400

Sumber : BPS Kabupaten Bangkalan

Pembangunan ekonomi akan tampak pada PDRB kabupaten Bangkalan yang semakin meningkat setiap tahunnya (Tabel 2), dan berkontribusi secara signifikan terhadap PAD melalui Pajak dan Retribusi.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Produk Domestik Regional Bruto

PDRB merupakan alat ukur pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam suatu wilayah pada suatu jangka waktu tertentu (Sadono Sukirno, 1994).

### Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total, income perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi (Sadono Sukirno, 1994).

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional, selain itu merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi, dan secara singkat merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang (Boediono, 1992).

Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya penambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan

alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial dan teknik.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Dalam pelaksanaan suatu otonomi daerah, setiap daerah otonom diberikan suatu kekuasaan dan wewenang oleh pemerintah dalam menjalankan rumah tangganya masing-masing. Dimana akan berguna dalam pembangunan daerah. PAD merupakan salah satu pendapat daerah setelah dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang menurut permendagri No 13 tahun 2006 pasal 25. Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang No 28 tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang di pisahkan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

**Pajak** adalah Kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame P
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Atas Hak Tanah Dan Bangunan

**Retribusi** adalah sebagai Pungutan Daerah yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah tersebut didasarkan atas prestasi / pelayanan yang diberikan pemda didasari peraturan yang berlaku, Objek Retribusi adalah : Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu. (Abdul Halim 2014) dalam undang-undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus

disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan.

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan Atau Kebersihan
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk Dan Akta
- d. Catatan Sipil
- e. Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat
- f. Retribusi Pelayanan Parkir Ditempat Umum
- g. Retribusi Pelayanan Pasar
- h. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- i. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- j. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- k. Retribusi Penyediaan Atau Penyedotan Kakus.
- l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- m. Retribusi Pelayanan Tera Atau Tera Ulang
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

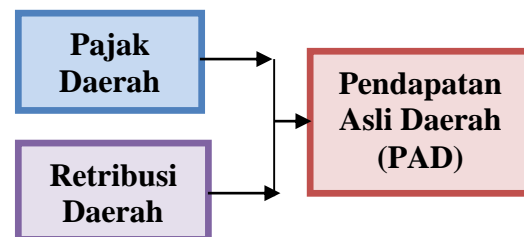
### Barang Publik

Adalah barang yang disediakan oleh pemerintah merupakan barang milik pemerintah yang dibiayai melalui anggaran belanja negara tanpa melihat siapa yang melaksanakan pekerjaannya. Jalan raya negara pembiayaannya dilakukan melalui anggaran negara dan jalan tersebut dapat dikerjakan oleh pihak swasta atau pemerintah sendiri. Mengenai penyediaan barang-barang publik yang dilakukan oleh pemerintah

seperti misalnya pertahanan nasional, jalan raya, kehakiman, pekerjaan umum dan sebagainya. Dalam hal barang swasta, barang tersebut dapat dihasilkan oleh perusahaan swasta, akan tetapi juga dapat dihasilkan oleh perusahaan negara, misal kereta api dan jasa penerbangan (Guritno Mangkoesobroto, 1991).

### 3. KERANGKA KONSEPTUAL

Ada 3 komponen pada kerangka konseptual yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD pada Kabupaten Bangkalan. Apakah ada pengaruh secara signifikan pajak dan retribusi antara sebelum dan sesudah dibangun jembatan Suramadu terhadap PAD.



### 4. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk membandingkan dan menganalisa kajian pengaruh sebelum dan sesudah pembangunan jembatan Suramadu terhadap PAD di kabupaten Bangkalan selama kurun waktu 2003-2009 dan kurun waktu 2010-2016, dan dampaknya.

### Data dan Sumber Data

Data yang digunakan untuk mendukung penulisan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen resmi serta laporan keuangan berupa data runtut waktu (time series) dari Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2016, yaitu data APBD dan PAD, untuk data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2010 sampai dengan 2018 kabupaten Bangkalan. Peneliti juga mengambil data sekunder yang dipublikasikan oleh kantor Badan Pusat Statistik (BPS).

### Model Analisis

Kemudian alat analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif yaitu analisis Ordinary Least Square (OLS)/Analisa regresi linear berganda dengan program *SPSS 20.0*, untuk mengetahui pengaruh sebelum dan sesudah pembangunan jembatan Suramadu terhadap penerimaan PAD melalui penerimaan pajak dan retribusi, menggunakan analisis regresi berganda.  $PAD = f(\text{Pajak, Retribusi})$ . Signifikansi model akan diuji dengan R square ( $R^2$ ), uji t dan uji F, Uji Beda.

## 5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Hasil Penelitian

Perkembangan Pajak Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangkalan Sebelum dan Sesudah Di Bangunnya Jembatan Suramadu, trendnya cenderung meningkat. Sebelum ada jembatan Suramadi PAD didominasi oleh pos Retribusi (Tabel 3).

Tabel 3. Pendapatan Pajak, Retribusi Dan PAD Di Kab. Bangkalan Sebelum Di Bangun Jembatan Suramadu 2003-2009

Tahun	Pajak Tahun (Rp)	Retribusi Tahun (Rp)	PAD (Rp)
2003	4.520.275.430,00	9.820.305.756,05	20.873.079.135,83
2004	5.044.031.555,00	10.024.869.701,00	20.568.365.524,22
2005	5.519.315.216,00	11.557.820.252,41	24.319.092.597,91
2006	5.835.507.134,00	14.881.286.436,00	28.758.649.010,37
2007	6.524.048.029,00	15.776.273.397,37	29.206.086.670,72
2008	6.998.126.963,00	17.726.960.883,00	32.106.006.582,67
2009	8.321.972.033,00	18.837.751.499,61	34.477.143.994,68

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Bangkalan

Setelah ada jembatan Suramadu pos Pajak mulai meningkat, menunjukkan aktivitas dibidang ekonomi mulai tumbuh (Tabel 4).

Tabel 4. Pendapatan Pajak, Retribusi Dan PAD Di Kabupaten Bangkalan Sesudah Di Bangun Jembatan Suramadu 2010-2016

Tahun	Pajak Tahun (Rp)	Retribusi Tahun (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)
2010	8.558.677.480,00	11.582.515.251,82	40.975.170.911,35
2011	12.607.491.954,00	17.840.109.824,50	65.039.401.681,82
2012	14.906.524.548,50	17.840.109.824,50	80.253.709.499,06
2013	17.089.402.540,00	28.591.339.715,55	92.463.602.849,85
2014	23.470.520.177,00	19.900.396.017,76	135.782.312.233,88
2015	27.244.911.416,00	16.981.194.113,41	175.622.298.613,43
2016	32.294.523.593,00	15.110.362.779,06	200.073.202.553,75

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Bangkalan

**Hasil Analisa Data Tahun 2003 – 2009**

**Sebelum ada Jembatan Suramadu**

**Analisa regresi linear berganda**

Persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

$$Y = 6149214777,417 + 0,222 X_1 + 1,397 X_2$$

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 6149214777,417; artinya jika Pajak ( $X_1$ ) dan Retribusi ( $X_2$ ) nilainya adalah 0, maka PAD ( $Y'$ ) nilainya adalah Rp 6.149.214.777,417.
- Koefisien regresi variabel Pajak ( $X_1$ ) sebesar 0,222; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Pajak mengalami kenaikan 1%, maka PAD ( $Y'$ ) akan mengalami peningkatan sebesar 0,222. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Pajak dengan PAD, semakin naik Pajak maka PAD semakin meningkat.
- Koefisien regresi variabel Retribusi ( $X_2$ ) sebesar 1,397; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Retribusi mengalami kenaikan 1%, maka PAD ( $Y'$ ) akan mengalami peningkatan sebesar 1,397. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Retribusi dengan PAD, semakin naik Retribusi maka PAD semakin meningkat.

Tabel 5. Hasil Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6149214777,417	1422620433,850		4,322	,012
Pajak	,222	,666	,053	,333	,756
Retribusi	1,397	,234	,945	5,966	,004

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Data dari SPSS 20.0

**Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)**

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen ( $Y$ ).

Dari hasil analisis regresi output tabel 6 dapat disajikan sebagai berikut:

- Pajak dengan nilai signifikan 0,756 berarti nilai signifikan sebesar  $0,756 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangkalan.
- Retribusi dengan nilai signifikan 0,004 berarti nilai signifikan sebesar  $0,004 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Retribusi ini berpengaruh positif terhadap PAD Kabupaten Bangkalan.

**Analisis Korelasi Ganda (R)**

Berdasarkan tabel 6 diperoleh angka R sebesar 0,995. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara Pajak dan Retribusi terhadap PAD, secara serentak.

**Analisis Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Berdasarkan tabel 6 diperoleh angka R<sup>2</sup> sebesar 0,990 yang artinya PAD Kabupaten Bangkalan dijelaskan oleh variasi variabel pajak dan retribusi sebesar 99,10% secara serentak dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yaitu sebesar 0.90%.

Tabel 6. Hasil Korelasi Berganda

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,995 <sup>a</sup>	,990	,985	662090063,8016

a. Predictors: (Constant), RETRIBUSI, PAJAK  
 Sumber: Data dari SPSS 20.0

**Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji F)**

Berdasarkan tabel 7 diatas menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05 maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif antara variabel Pajak dan Retribusi terhadap PAD Kabupaten Bangkalan.

Tabel 7. Hasil Rgresi Simultan

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1740329756313 27800000,000	2	87016487815 663900000,000	198,5 03	,000 <sup>b</sup>
Residual	1753453010339 254530,000	4	43836325258 4813570,000		
Total	1757864286416 67060000,000	6			

a. Dependent Variable: PAD  
 b. Predictors: (Constant), RETRIBUSI, PAJAK  
 Sumber : Data dari SPSS 20.0

**Hasil Analisa Data Tahun 2010 – 2016  
 Sesudah ada Jembatan Suramadu  
 Analisa regresi linear berganda.**

Persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

$$Y = 13056595954,948 + 6,924X_1 - ,461 X_2$$

- Konstanta sebesar 13056595954,95 artinya jika Pajak (X<sub>1</sub>) dan Retribusi (X<sub>2</sub>) nilainya adalah 0, maka PAD (Y') nilainya adalah Rp 13.056.595.954,948.
- Koefisien regresi variabel Pajak (X<sub>1</sub>) sebesar 6,924; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Pajak mengalami kenaikan 1%, maka PAD (Y') akan mengalami peningkatan sebesar 6.924. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Pajak dengan PAD, semakin naik Pajak maka PAD semakin meningkat.
- Koefisien regresi variabel Retribusi (X<sub>2</sub>) sebesar -,461; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Retribusi mengalami kenaikan 1%, maka PAD (Y') akan mengalami penurunan sebesar 0,461. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara Retribusi dengan PAD, semakin naik Retribusi maka PAD semakin menurun.



Tabel 8. Hasil Regresi Linear Berganda

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-13056595954,948	8641696716,025		-1,511	,205
Pajak	6,924	,235	,995	29,406	,000
Retribusi	-,461	,362	-,043	-1,272	,272

a. Dependent Variable: PAD  
 Sumber : Data dari SPSS 20.0

**Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)**

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Dari hasil analisis regresi output tabel 8 dapat disajikan sebagai berikut:

- Pajak dengan nilai signifikan 0,000 berarti nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Pajak berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangkalan.
- Retribusi dengan nilai signifikan 0,272 berarti nilai signifikan sebesar  $0,272 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Retribusi ini tidak berpengaruh positif terhadap PAD Kabupaten Bangkalan.

**Analisis Korelasi Ganda (R)**

Berdasarkan tabel 9 diperoleh angka R sebesar 0,998. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat

antara Pajak dan Retribusi terhadap PAD, secara serentak.

**Analisis Determinasi ( $R^2$ )**

Berdasarkan tabel 9 diperoleh angka  $R^2$  sebesar 0,995 yang artinya PAD Kabupaten Bangkalan dijelaskan oleh variasi variabel pajak dan retribusi sebesar 99,5% secara serentak dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yaitu sebesar 0.50%.

Tabel 9. Hasil Korelasi Berganda

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,998 <sup>a</sup>	,995	,993	4896742388,8449

a. Predictors: (Constant), RETRIBUSI, PAJAK  
 Sumber : Data dari SPSS 20.0

**Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji F)**

Berdasarkan tabel 9 di bawah menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh dengan tingkat signifikan  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif antara variabel Pajak dan Retribusi terhadap PAD Kabupaten Bangkalan

Tabel 10. Hasil Regresi Simultan ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2090818668075614 3000000,000	2	104540933403780 72000000,000	435,985	,000 <sup>b</sup>
Residual	9591234409084187 0000,000	4	239780860227104 70000,000		
Total	2100409902484698 6000000,000	6			

a. Dependent Variable: PAD  
 b. Predictors: (Constant), RETRIBUSI, PAJAK

Sumber : Data dari SPSS 20.0

**UJI BEDA SAMPEL T-TEST**

• **Pajak**

Tabel 11. Penerimaan Pajak Sesudah Dan Sebelum

No	Sebelum	Sesudah
1	4.520.275.430,00	8.558.677.480,00
2	5.044.031.555,00	12.607.491.954,00
3	5.519.315.216,00	14.906.524.548,50
4	5.835.507.134,00	17.089.402.540,00
5	6.524.048.029,00	23.470.520.177,00
6	6.998.126.963,00	27.244.911.416,00
7	8.321.972.033,00	32.294.523.593,00

Sumber : Data Diolah

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata pajak sebelum dan sesudah pembangunan jembatan Suramadu.

Hipotesis :

Ho : Rata-rata penerimaan pajak sebelum dan sesudah ada jembatan Suramadu tidak ada perbedaan

H1 : Rata-rata penerimaan pajak sebelum dan sesudah ada jembatan Suramadu ada perbedaan.

Tabel 12. Output Pertama Pajak

Paired Samples Statistics					
		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	SEBELUM	6109039480,0000	7	128716658,278570	486503239,13768
	UM				
	SESUDAH	1945315024,40714	7	850062110,946995	321293277,789192
	DAH				

Sumber : Data dari SPSS 20.0

Berdasarkan table 12 menunjukkan bahwa rata-rata penerimaan pajak sebelum dibangun jembatan suramadu untuk 7 tahun

adalah sebesar 6.109.039.480 dan rata-rata penerimaan pajak sesudah di bangunnya jembatan suramadu adalah sebesar 19.453.150.244,07.

Tabel 13. Output Kedua Pajak

Paired Samples Correlations				
		N	Correlation	Sig.
Pair 1	SEBELUM & SESUDAH	7	,989	,000

Sumber : Data dari SPSS 20.0

Berdasarkan tabel 13 diperoleh angka R sebesar 0,989, menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara Pajak sebelum dan sesudah dibangun jembatan suramadu.

Berdasarkan table 14 nilai nilai signifikan Sig. (2-tailed) sebesar 0,003 < 0,05, kesimpulannya H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima. Maka rata-rata penerimaan Pajak sebelum dan sesudah ada jembatan Suramadu ada perbedaan.

Tabel 14. Output Ketiga Pajak

Pair 1 SEBELUM-SESUDAH			
Mean	13344110764.07143		
Std. Deviation	7229867078.60110		
Std. Error Mean	2732632900.29023		
95% Confidence Interval of the Difference	Lower	20030622592.61995	
	Upper	6657598935.52291	
t	4.883		
df	6		
Sig. (2-tailed)	,003		

Sumber : Data dari SPSS 20.0

• **Retribusi**

Tabel 15. Penerimaan Retribusi Sesudah Dan Sebelum

No	Sebelum	Sesudah
1	9.820.305.756,05	11.582.515.251,82
2	10.024.869.701,00	17.840.109.824,50
3	11.557.820.252,41	22.838.667.099,00
4	14.881.286.436,00	28.591.339.715,55
5	15.776.273.397,37	19.900.396.017,76
6	17.726.960.883,00	16.981.194.113,41
7	18.837.751.499,61	15.100.362.779,06

Sumber : Data Diolah

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata retribusi sebelum dan sesudah pembangunan jembatan Suramadu.

Hipotesis

Ho : Rata-rata penerimaan retribusi sebelum dan sesudah ada jembatan Suramadu tidak ada perbedaan

H1 : Rata-rata penerimaan retribusi sebelum dan sesudah ada jembatan Suramadu ada perbedaan

Berdasarkan table 16 menunjukan bahwa rata-rata penerimaan retribusi sebelum dibangun jembatan suramadu untuk 7 tahun adalah sebesar 14.089.323.989,34 dan rata-rata penerimaan retribusi sesudah di bangunnya jembatan suramadu adalah sebesar 18.976.369.257,30.

Tabel 16. Output Pertama Retribusi

Paired Samples Statistics				
	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 SEBELUM	14089323989,3486	7	3660732743,61013	1383626922,26623
SESUDAH	18976369257,3000	7	5525443264,45401	2088421251,59175

Sumber : Data dari SPSS 20.0

Berdasarkan tabel 17 diperoleh angka R sebesar 0,082, menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat lemah antara retribusi sebelum dan sesudah dibangun jembatan suramadu

Tabel 17. Output Kedua Retribusi

Paired Samples Correlations			
	N	Correlation	Sig.
Pair 1 SEBELUM & SESUDAH	7	,082	,862

Sumber : Data dari SPSS 20.0

Tabel 18. Output Ketiga Retribusi

Pair 1 SEBELUM-SESUDAH		
Mean	4887045267,95143	
Std. Deviation	6373860378,5425	
Std. Error Mean	2409092779,02221	
95% Confidence Interval of the Difference	Lower	-1078882939,44839
	Upper	1007792403,54553
t	2,029	
df	6	
Sig. (2-tailed)	,089	

Sumber : Data dari SPSS 20.0

Berdasarkan table 18 nilai nilai signifikan Sig. (2-tailed) sebesar 0,089 > 0,05, kesimpulannya H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak. Maka rata-rata penerimaan retribusi sebelum dan sesudah ada jembatan Suramadu tidak ada perbedaan.

## 6. PENUTUP

### • Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil perhitungan Analisa regresi dapat diketahui bahwa :

Tabel 19. Analisa Regresi Pajak dan Retribusi (sebelum dan sesudah)

Jembatan Suramadu	PAD	Koefisien Regresi	Sig.	Uji Parsial	R	R2	F	Uji Simultan	Keterangan
Sebelum	Pajak	0,222	0,756	Ho diterima Ha ditolak	0,995	0,990	0,000	Ho ditolak Ha diterima	Pajak kurang berpengaruh
	Retribusi	1,397	0,004	Ho ditolak Ha diterima					Retribusi berpengaruh
Sesudah	Pajak	6,924	0,000	Ho ditolak Ha diterima	0,998	0,995	0,000	Ho ditolak Ha diterima	Pajak berpengaruh
	Rtribusi	-0,461	0,272	Ho diterima Ha ditolak					Retribusi kurang berpengaruh

Sumber : Data Diolah

Pada table 19 di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum ada pembangunan jematan Suramadu Pajak kurang berpengaruh an Retribusi berpengaruh karena kegiatan ekonomi bertumpu pada sektor peranian primer Artinya pertanian atau sektor tradisional menjadi sektor andalan. Sedangkan sesudah ada pembangunan jembatan Suramadu Pajak berpengaruh dan Retribusi kurang berpengaruh karena kegiatan ekonomi berkembang terutama usaha di sektor pertanian, industri, perdagangan, jasa dan meningkatnya arus barang masuk ke Pulau Madura.

2. Hasil perhitungan Uji Beda dapat diketahui bahwa :

Tabel 20. Uji Beda Pajak dan Retribusi (sebelum dan sesudah)

Jembatan Suramadu	PAD	Mean	R	Sig.	Uji Parsial	Keterangan
Sebelum	Pajak	6,109,039,480.00	0,989	0,003	Ho ditolak	Pajak berpengaruh
Sesudah		19,453,150,244.00			Ha diterima	
Sebelum	Retribusi	14,089,323,989.35	0,082	0,089	Ho diterima	Retribusi kurang berpengaruh
Sesudah		18,976,369,257.30			Ha ditolak	

Sumber : Data Diolah

Pada table 20 di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum dan sesudah ada pembangunan jembatan Suramadu pada pos Pajak kuat hubungannya dan berpengaruh karena Kegiatan di sektor riil semakin berkembang dan meningkatnya arus barang masuk ke Kab. Bangkalan. Sedangkan sebelum dan sesudah ada pembangunan jembatan Suramadu pada pos Retribusi kurang kuat hubungannya dan kurang berpengaruh dalam kontribusi ke PAD karena kegiatan pada Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan masih belum berkembang (mis. Pariwisata dll).

### • Saran

Dari kesimpulan yang telah dibuat maka ada beberapa saran yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah melakukan evaluasi kegiatan ekonomi daerah setelah ada jembatan Suramadu.
2. Pemerintah daerah melakukan monitoring kegiatan ekonomi yang memberikan peningkatan kontribusi terhadap PAD.
3. Pemerintah daerah untuk meningkatkan sektor pariwisata dan lain-lainnya agar kontribusi pada PAD meningkat melalui retribusi.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat
- Boediono, 2014, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2 EKONOMI MAKRO*, Yogyakarta : BPFU UGM.
- Departemen Dalam Negeri. 1989, *"Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia"*, UI-Press, Jakarta.
- D.J. Mamesah, 1995 *"Sistem Administrasi Keuangan Daerah"*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Guritno Mangkoesoebroto, 1991, *Ekonomi Publik*, BPFU, Yogyakarta.
- Mamonto, Sandry Yossi, J.B. Kalangi Dan Krest D, Tolosang, 2104, *"Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal"*, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- M.Supramoko, 1997. *"Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek"*, BPFU, Jakarta
- Pakpahan, Ronald, 2009. *"Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatra Utara"*, Universitas Sumatra Utara, Medan.
- Ruswandi, R. 2009. *Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sumedang*. Bogor : Institut pertanian Bogor.
- Sadono Sukirno, 2012, *Pengantar Teori Makroekonomi*. Edisi 3 *Rajawali Pers : Jakarta*
- Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Pajak daerah dan retribusi Daerah Berdasarkan undang-Undang no 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. *Rajawali Pers : Jakarta*.
- Soediyono Reksoprayitno, 2009, *Pengantar Ekonomi Makro*, BPFU, Yogyakarta.
- Tulus Tambunan, 1998, *Krisis Ekonomi dan Masa Depan*, FE Universitas Indonesia.
- Undang-undang no 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang no 34 tahun 2000 dan Undang-undang no 18 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-undang Tahun 2001 Tentang *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.

